

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SETELAH OTONOMI DAERAH

*(Growth and Structural Alteration of Agricultural Sector in Central
Java Province when Before and After Exercise of Area Autonomy)*

Maria

Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana

Irham, Djuwari

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The research objectives to know: (1) alteration structural of agricultural sector in Central Java compared to alteration of national agricultural sector chartered investment council structure before and after decentralization; (2) identification of pledge agricultural sector in improvement of economic growth rate regional in Central Java before and after decentralization; (3) velocity and growth typology of Central Java agricultural sector before and after decentralization. This research applies descriptive analytical method and data used are GRDP Central Java and GDP National during 1995–2005 based on constant price of 2000. Growth average speed of field crop, plantation and breeding, and forestry improved after the decentralization was implemented, while growth average speed of fishery sector decreasing. LQ and DLQ analyses show that field crop and breeding sectors are still expected to be basis sector before decentralization. After decentralization was implemented, field crop and breeding remain to be basis, while plantation crop and forestry experiences reposition from non basis towards basis. Klassen Typology analysis shows that field crop and breeding are fast growth before decentralization. After decentralization, plantation crop and forestry classified as fast growth sector. The speed growth of food crops, plantation, breeding, and forestry accelerated after decentralization, while fishery sector is relatively lags.

Keywords : *agricultural sector, alteration of structure, decentralization, growth*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi pertanian yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adanya potensi pertanian di suatu daerah tidaklah mempunyai arti bagi pertumbuhan pertanian daerah tersebut bila tidak ada upaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi

pertanian secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi pertanian yang potensial harus menjadi prioritas utama untuk digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan pertanian daerah secara utuh (Rusmadi, 2002).

Diberlakukannya UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1974 maka kewenangan pemerintah pusat selain kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, fiskal dan agama, didesentralisasikan ke daerah, artinya pemerintah daerah dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam berotonomi, seperti kekayaan sumberdaya alam, kelembagaan, lingkungan yang kondusif, *networking* dan sumberdaya manusia.

Provinsi Jawa Tengah dengan segenap potensi dan kekhususan sektor pertanian yang dimiliki haruslah mampu mengembangkan suatu kebijaksanaan pembangunan pertanian yang dapat memberikan kontribusi positif dalam kerangka konsep pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan setiap potensi sektor pertanian yang ada hendaknya dapat menciptakan peluang dan kesempatan bagi usaha-usaha peningkatan perekonomian. Antisipasi dan respon yang tepat oleh daerah dalam pemanfaatan sumber-sumber pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pertumbuhan sektor pertanian yang ditempuh haruslah mampu menciptakan suatu struktur pertanian yang kuat dan dapat memberikan peluang yang sama bagi setiap pelaku pertanian untuk berperan dan menikmatinya. Sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah paling banyak menyerap pekerja (sekitar 45%). Produktivitas pekerja di sektor pertanian paling rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas sektor pertanian, antara lain penguasaan lahan pertanian yang terlalu sempit (sekitar 0,3 ha per rumah tangga petani), kurangnya penguasaan informasi pasar dan IPTEK, rendahnya nilai tambah produksi pertanian dan adanya periode menunggu hasil usaha pertanian. Di samping itu, sistem produksi pertanian belum mampu menjamin kelangsungan dan kualitas yang baik serta adanya kebijakan impor komoditas pertanian yang kurang mendukung, menyebabkan beberapa komoditas tertentu tersaingi oleh produk impor.

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas maka diperlukan untuk melihat perubahan struktur sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah, mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari subsektor pertanian andalan dan penentuan laju serta tipologi pertumbuhan sektor pertanian. Penelitian seperti ini menjadi penting dan menarik karena subsektor pertanian andalan dapat ditentukan berdasarkan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang menjadi tumpuan bagi pengembangan perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 1999).

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder selama 11 tahun (tahun 1995–2005) dari instansi-instansi terkait ialah kantor BPS Jakarta dan Kantor Statistik serta BAPPEDA Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang digunakan dalam mengamati waktu sebelum pelaksanaan otonomi daerah adalah dari tahun 1995–1999, sedangkan kurun waktu tahun 2000–2005 untuk melihat setelah pelaksanaan otonomi daerah. Adapun data-data tersebut diolah melalui:

a. Analisis Shift-Share

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui kinerja subsektor pertanian karena adanya pengaruh seperti kebijaksanaan pemerintah daerah dan lain-lain. Dengan mengacu pada analisis *Shift-Share* Soepono dalam Istiwa (2003), maka untuk menganalisis nilai produksi subsektor *i* di wilayah *j* (Provinsi Jawa Tengah), digunakan persamaan:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Apabila analisis ini diterapkan pada nilai subsektor pertanian *P* maka:

$$D_{ij} = P^*_{ij} - P_{ij}$$

$$N_{ij} = P_{ij} \cdot r_n ; M_{ij} = P_{ij} (r_{in} - r_n) ; C_{ij} = P_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana r_{ij} , r_{in} , r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (P^*_{ij} - P_{ij})/P_{ij}$$

$$r_{in} = (P^*_{in} - P_{in})/P_{in}$$

$$r_n = (P^*_n - P_n)/P_n$$

Keterangan:

D_{ij} = perubahan suatu variabel lokal seperti nilai tambah, kesempatan kerja, pendapatan dan *output* selama kurun waktu tertentu di Provinsi Jawa Tengah

N_{ij} = pertumbuhan nasional subsektor pertanian *i* di wilayah *j*

M_{ij} = bauran industri subsektor pertanian *i* di wilayah *j*

C_{ij} = keunggulan kompetitif subsektor pertanian *i* di wilayah *j*

P_{ij} = nilai produksi subsektor pertanian *i* di Provinsi Jawa Tengah pada tahun dasar

AGRO EKONOMI

- P^*_{ij} = nilai produksi subsektor pertanian i di Provinsi Jawa Tengah pada tahun akhir
- P_{in} = nilai produksi subsektor pertanian i di tingkat nasional pada tahun dasar
- P_n = total nilai produksi sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun dasar (awal analisis)
- P^*_n = total nilai produksi sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun akhir (akhir analisis)
- r_n = laju pertumbuhan nilai produksi total nasional
- r_{in} = laju pertumbuhan nilai produksi subsektor pertanian i tingkat nasional
- r_{ij} = laju pertumbuhan nilai produksi subsektor pertanian i di Provinsi Jawa Tengah

Implikasi dari rumus *shift-share* di atas menyatakan bahwa *shift proportional* yang menjelaskan pengaruh bauran industri sektor i di daerah j sebagai berikut:

1. $r_{in} > r_n$, berarti pengaruh bauran industri untuk subsektor pertanian i di daerah j lebih cepat daripada laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
2. $r_{in} = r_n$, berarti pengaruh bauran industri untuk subsektor pertanian i di daerah j menjadi nol atau sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
3. $r_{in} < r_n$, berarti pengaruh bauran industri untuk subsektor pertanian i di daerah j lebih lambat daripada laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Untuk *shift differential* yang menjelaskan keunggulan kompetitif subsektor pertanian i di daerah j adalah:

- a. $r_{ij} > r_{in}$, berarti pengaruh keunggulan kompetitif untuk subsektor pertanian i di daerah j lebih tinggi daya saingnya daripada subsektor yang sama ditingkat nasional.
- b. $r_{ij} = r_{in}$, berarti pengaruh keunggulan kompetitif untuk subsektor pertanian i di daerah j menjadi nol atau sama daya saingnya dengan subsektor yang serupa ditingkat nasional.
- c. $r_{ij} < r_{in}$, berarti pengaruh keunggulan kompetitif untuk subsektor pertanian i di daerah j lebih rendah daya saingnya daripada subsektor yang sama ditingkat nasional.

b. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Model pendekatan LQ ini dapat disajikan dalam bentuk persamaan:

$$LQ_i^j = \frac{PDRB^{ip} / PDB^{in}}{TPDRB^P / TPDB^n}$$

Keterangan:

- LQ_i^j = *location quotient* subsektor pertanian i di Provinsi Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah
- $PDRB^{ip}$ = nilai tambah bruto subsektor pertanian i di Provinsi Jawa Tengah (PDRB subsektor pertanian i di daerah)
- PDB^{in} = nilai tambah subsektor pertanian i ditingkat nasional (PDB subsektor pertanian i ditingkat nasional)
- $TPDRB^P$ = total produk domestik regional bruto sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah
- $TPDB^n$ = total produk domestik bruto sektor pertanian ditingkat nasional

Kriteria untuk menentukan nilai LQ ini adalah jika $LQ > 1$, subsektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis, bisa diandalkan untuk dikembangkan karena mempunyai prospektif yang baik terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian. Kemampuan subsektor tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB lebih besar dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB ditingkat nasional. Jika $LQ = 1$, kemampuan subsektor yang bersangkutan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di daerah sama dengan kemampuan kontribusinya terhadap PDB ditingkat nasional. Sebaliknya, jika subsektor yang bersangkutan memperoleh $LQ < 1$ maka subsektor yang bersangkutan di daerah lebih rendah dari tingkat nasional atau sektor tersebut hanya bersifat lokal. Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor, semakin tinggi pula *comperative advantage* daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut.

c. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Menurut Suyatno (2000), untuk mengatasi kelemahan metode LQ yang bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu waktu tertentu, maka digunakan varian dari LQ, yaitu *Dynamic Location Quetiont (DLQ)* sehingga dapat diketahui perubahan atau reposisi sektoral, dengan formulasi sebagai berikut:

$$DLQ = \frac{\left[\frac{(1 + g_{ij})}{(1 + g_{.j})} \right]^t}{\left[\frac{(1 + G_i)}{(1 + G_{..})} \right]^t}$$

Keterangan :

DLQ = indeks *dynamic location quotient*

g_{ij} = rata-rata laju pertumbuhan subsektor pertanian i di Provinsi Jawa Tengah

$g_{.j}$ = rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah

G_i = rata-rata laju pertumbuhan subsektor pertanian i di tingkat nasional

$G_{..}$ = rata-rata laju pertumbuhan di tingkat nasional

t = kurun waktu analisis

Kriteria:

- a. $DLQ \geq 1$, sektor ke i masih dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.
- b. $DLQ \leq 1$, sektor ke i tidak dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.

d. Gabungan LQ dan DLQ

Analisis basis ekonomi untuk mengetahui apakah terjadi reposisi sektor terutama sektor pertanian di masa yang akan datang, yaitu dengan cara mengkombinasikan nilai dari LQ dan DLQ, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$, maka suatu sektor belum mengalami reposisi, artinya sektor yang menjadi basis pada saat ini juga masih menjadi basis di masa yang akan datang.
- b. $LQ > 1$ dan $DLQ < 1$, maka suatu sektor telah mengalami reposisi dan tidak bisa diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.
- c. $LQ < 1$ dan $DLQ > 1$, maka suatu sektor telah mengalami reposisi dari sektor non basis menjadi sektor basis.
- d. $LQ < 1$ dan $DLQ < 1$, maka suatu sektor belum mengalami reposisi dan tetap menjadi sektor non basis (Suyatno, 2000).

e. Analisis Tipologi Pertumbuhan Sektor Pertanian

Analisis menurut Klassen Typologi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan masing-masing subsektor pertanian (Sjafrizal, 1997).

Penggunaan dan interpretasi alat analisis Klassen Typologi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut "Klassen Typologi"

Laju Pertumbuhan	Kontribusi	
	$y_{ik} > y_i$	$y_{ik} < y_i$
$r_{ik} > r_i$	Subsektor pertanian maju dan tumbuh cepat	Subsektor pertanian berkembang cepat
$r_{ik} < r_i$	Subsektor maju tetapi tertekan	Subsektor relatif tertinggal

Keterangan:

- r_{ik} = laju pertumbuhan subsektor pertanian i di Provinsi Jawa Tengah
- r_i = laju pertumbuhan subsektor pertanian i di tingkat nasional
- y_{ik} = kontribusi subsektor i terhadap nilai produksi wilayah Provinsi Jawa Tengah
- y_i = kontribusi subsektor i terhadap nilai produksi nasional

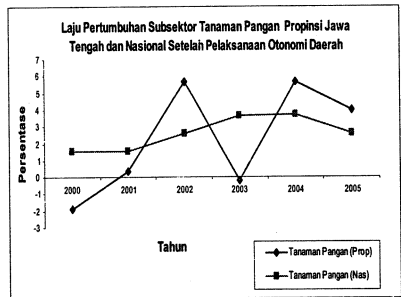
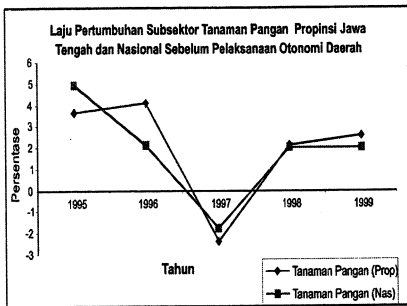
Laju pertumbuhan nilai produksi subsektor pertanian i tingkat Provinsi Jawa Tengah (r_{ik}) dan tingkat nasional (r_i) serta kontribusi subsektor pertanian i terhadap total nilai produksi tingkat Provinsi Jawa Tengah (y_{ik}) dan tingkat nasional (y_i) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Sektor Pertanian

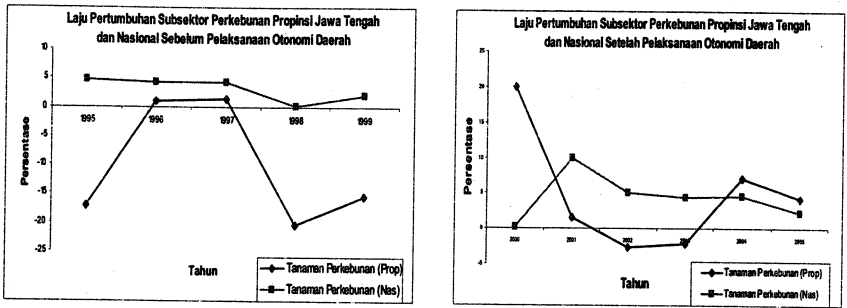
Peranan sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, dalam pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama ini masih dominan dan cukup strategis.

Rerata laju pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebelum penerapan otonomi daerah (tahun 1995–1999) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,00 dan meningkat menjadi 2,27 setelah penerapan otonomi daerah (tahun 2000–2005). Kondisi perubahan perbedaan laju pertumbuhan subsektor tanaman pangan Provinsi Jawa Tengah dan nasional secara grafis ditampilkan pada Gambar 1.



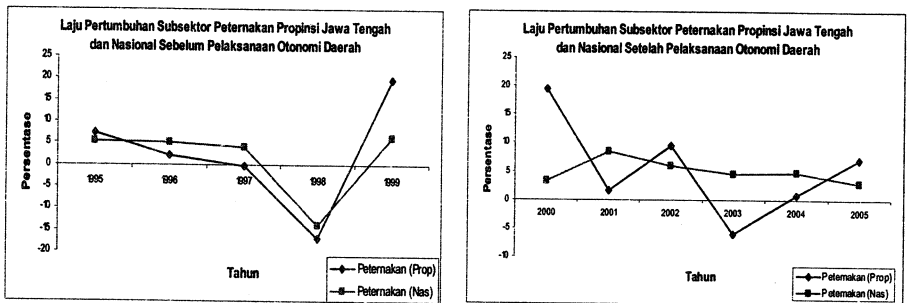
Gambar 1. Laju Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan

Rerata laju pertumbuhan tanaman perkebunan sebelum penerapan otonomi daerah (tahun 1995–1999) di Provinsi Jawa Tengah sebesar -10,14 dan meningkat menjadi 4,65 setelah penerapan otonomi daerah (tahun 2000–2005). Hal ini seiring dengan *trend* pengobatan dunia yang mengarah ke herbal, jamu juga didorong untuk dipasarkan di pasar mancanegara. Puluhan pabrik jamu berskala Usaha Kecil Menengah dan Besar yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah berpotensi untuk terus dikembangkan ke pasar ekspor. Kondisi perubahan perbedaan laju pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional secara grafis ditampilkan pada Gambar 2.



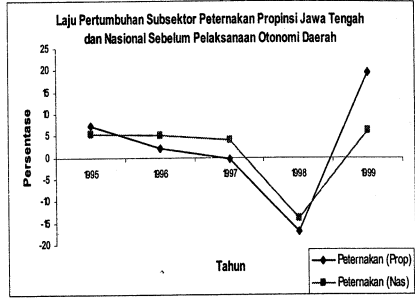
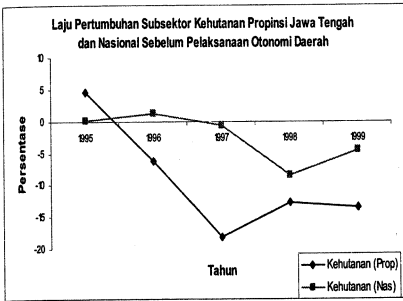
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan

Rerata laju pertumbuhan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebelum penerapan otonomi daerah (tahun 1995–1999) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,33 dan meningkat menjadi 5,37 setelah penerapan otonomi daerah (tahun 2000–2005). Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar untuk menjadi penghasil utama ternak dan produk hasil ternak di Indonesia. Kondisi perubahan perbedaan laju pertumbuhan subsektor peternakan Provinsi Jawa Tengah dan nasional secara grafis ditampilkan pada Gambar 3.



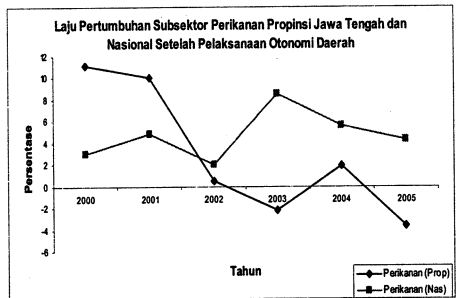
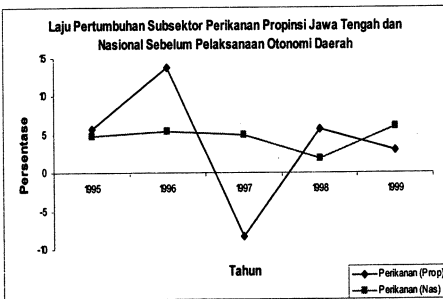
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan

Rerata laju pertumbuhan subsektor kehutanan sebelum penerapan otonomi daerah (tahun 1995–1999) di Provinsi Jawa Tengah sebesar -9,17 dan meningkat menjadi 5,63 setelah penerapan otonomi daerah (tahun 2000–2005). Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Revitalisasi Hutan sebagai program pembangunan kehutanan untuk mengakselerasi terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang menjamin kelestarian hutan bagi kemakmuran rakyat. Kondisi perubahan perbedaan laju pertumbuhan subsektor kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan nasional secara grafis ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Subsektor Kehutanan

Rerata laju pertumbuhan subsektor perikanan sebelum penerapan otonomi daerah (tahun 1995–1999) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,02 dan menurun menjadi 2,68 setelah penerapan otonomi daerah (tahun 2000–2005). Potensi perikanan Provinsi Jawa Tengah belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan modal dan ketrampilan sebagian besar nelayan nyaris tidak berkembang. Kondisi perubahan perbedaan laju pertumbuhan subsektor perikanan Provinsi Jawa Tengah dan nasional secara grafis ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan

Laju pertumbuhan PDRB pertanian berdasarkan harga konstan dari tahun 1994–1996 rata-rata 4,44% per tahun, namun pada tahun 1996–1998 mengalami penurunan rata-rata minus 3,28% per tahun. Penurunan tersebut disebabkan adanya krisis ekonomi dengan kenaikan harga bahan input pertanian yang cukup tinggi, terutama yang berasal dari impor, sehingga mempengaruhi proses produksi pertanian. Pada tahun 1998–2000, ternyata PDRB pertanian meningkat kembali menjadi rata-rata 2,14% per tahun.

2. Perubahan Struktur Sektor Pertanian

Sebelum adanya pelaksanaan penerapan otonomi daerah, subsektor pertanian yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif serta tidak memiliki spesialisasi (*competitive disadvantage, not specialized*) adalah subsektor tanaman perkebunan, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain, subsektor yang menunjukkan adanya spesialisasi dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage, specialized*) adalah subsektor tanaman pangan, sedangkan subsektor peternakan mempunyai keunggulan kompetitif tetapi tidak terspesialisasi. Hal ini berarti hasil dari tanaman pangan terkonsentrasi di Provinsi Jawa Tengah serta mempunyai kemampuan untuk menjual produk dari kedua subsektor tersebut keluar wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Efek Alokasi Perubahan Struktur Sektor Pertanian Regional Provinsi Jawa Tengah Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (dalam Miliar)

No	Definisi	Efek Alokasi (Aij)	Komponen	
			Spesialisasi	Keunggulan Kompetitif
1	<i>Competitive advantage, specialized</i>	132,15	5.687,16	0,020
2	<i>Competitive disadvantage, not specialized</i>	967,46	-2.430,07	-0,390
3	<i>Competitive advantage, not specialized</i>	-3,35	-806,38	0,004
4	<i>Competitive disadvantage, not specialized</i>	272,00	-652,46	-0,420
5	<i>Competitive disadvantage, not specialized</i>	201,09	-1.798,25	-0,110

Keterangan:

- Nomor urut subsektor pertanian 1 = tanaman pangan
- Nomor urut subsektor pertanian 2 = tanaman perkebunan
- Nomor urut subsektor pertanian 3 = peternakan
- Nomor urut subsektor pertanian 4 = kehutanan
- Nomor urut subsektor pertanian 5 = perikanan

Kondisi ini berubah seiring adanya pelaksanaan otonomi daerah. Subsektor pertanian yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif serta tidak memiliki spesialisasi (*competitive disadvantage, not specialized*) adalah subsektor perikanan. Di sisi lain, subsektor yang menunjukkan adanya tidak spesialisasi tetapi memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage, not specialized*) adalah subsektor tanaman perkebunan dan kehutanan, sedangkan subsektor tanaman pangan dan peternakan tidak mempunyai keunggulan kompetitif tetapi terspesialisasi (*competitive disadvantage, specialized*). Hal ini berarti setelah pelaksanaan

AGRO EKONOMI

otonomi daerah, hasil tanaman perkebunan dan kehutanan memiliki potensi untuk dijual ke luar daerah walaupun Provinsi Jawa Tengah belum terkonsentrasi atau terspesialisasi seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Efek Alokasi Perubahan Struktur Sektor Pertanian Regional Provinsi Jawa Tengah Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (dalam Miliar Rupiah)

No	Definisi	Efek Alokasi (Aij)	Komponen	
			Spesialisasi	Keunggulan Kompetitif
1	<i>Competitive disadvantage, specialized</i>	-889,66	6.211,29	-0,14
2	<i>Competitive advantage, not specialized</i>	-1.096,41	-3.039,25	0,36
3	<i>Competitive disadvantage, specialized</i>	-127,14	318,39	-0,39
4	<i>Competitive advantage, not specialized</i>	-158,61	-1.324,23	0,12
5	<i>Competitive disadvantage, not specialized</i>	1.003,62	-2.166,21	-0,46

Keterangan:

Nomor urut subsektor pertanian 1 = tanaman pangan

Nomor urut subsektor pertanian 2 = tanaman perkebunan

Nomor urut subsektor pertanian 3 = peternakan

Nomor urut subsektor pertanian 4 = kehutanan

Nomor urut subsektor pertanian 5 = perikanan

Terjadinya reposisi subsektor pertanian di masa yang akan datang dapat diketahui dengan cara mengkombinasikan nilai LQ dan DLQ. Adapun data yang menunjukkan nilai DLQ dan LQ subsektor pertanian sebelum pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Nilai DLQ dan LQ Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sektor Pertanian	Nilai DLQ	Nilai LQ Rata-rata	Keterangan
Tanaman pangan	1,39	2,21	Tetap Basis
Tanaman perkebunan	$-9,74 \times 10^1$	0,63	Tetap Non Basis
Peternakan dan hasil-hasilnya	3,16	1,19	Tetap Basis
Kehutanan	$-2,75 \times 10^4$	0,84	Tetap Non Basis
Perikanan	0,36	0,73	Tetap Non Basis

AGRO EKONOMI

Dari Tabel 4, terlihat bahwa subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan belum mengalami reposisi. Subsektor tanaman pangan dan peternakan menjadi basis pada saat ini dan juga masih menjadi basis di masa mendatang. Kedua subsektor ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian pertanian di masa yang akan datang, sehingga pemerintah daerah (Provinsi Jawa Tengah) perlu lebih memperhatikan perkembangan dan kesinambungan dari subsektor tanaman pangan dan peternakan.

Adapun subsektor perkebunan, kehutanan dan perikanan belum mengalami reposisi dan tetap menjadi sektor non basis. Jika keadaannya tidak berubah, maka, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang, tetap menjadi sektor non basis. Kondisi luas areal perkebunan di Provinsi Jawa Tengah menyusut 41.770,68 ha atau 6,85% menyebabkan produksi perkebunan mengalami penurunan 5.759,31 ton yang berasal dari 16 jenis komoditas. Penyusutan terjadi akibat adanya penebangan tanaman tua atau rusak, pelebaran jalan, terkena jaringan listrik, serangan hama atau penyakit, kekeringan, bencana alam, beralih fungsi dan pemukiman. Pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa seluas 2.566 juta ha menghadapi tantangan berat karena hutan negara yang dikelola Perhutani dikelung 6.000 desa dengan jumlah penduduk 23 juta jiwa. Karakteristik hutan Jawa itu membuat persoalan pengelolaan hutan dipengaruhi dinamika masyarakat Jawa yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan politik.

Dengan adanya otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, strategi kebijakan yang ditempuh melalui pengembangan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta mendorong dan melaksanakan kerjasama antar daerah. Hal ini dapat meningkatkan potensi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah, seperti yang terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai DLQ dan LQ Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sektor Pertanian	Nilai DLQ	Nilai LQ Rata-rata	Keterangan
Tanaman pangan	1,20	2,05	Tetap Basis
Tanaman perkebunan	2,66	0,78	Reposisi Basis
Peternakan dan hasil-hasilnya	2,70	1,32	Tetap Basis
Kehutanan	$2,67 \times 10^3$	0,44	Reposisi Basis
Perikanan	0,19	0,62	Tetap Non Basis

AGRO EKONOMI

Pada Tabel 5, terlihat bahwa subsektor tanaman pangan dan peternakan serta hasil-hasilnya belum mengalami reposisi. Subsektor tanaman pangan dan peternakan menjadi basis pada saat ini dan juga masih menjadi basis di masa mendatang. Di lain pihak, subsektor tanaman perkebunan dan kehutanan mengalami reposisi dari subsektor non basis menjadi basis. Keempat subsektor ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian pertanian di masa yang akan datang sehingga pemerintah daerah (Provinsi Jawa Tengah) perlu lebih memperhatikan perkembangan dan kesinambungan dari subsektor tanaman pangan dan peternakan. Sedangkan, subsektor perikanan belum mengalami reposisi dan tetap menjadi sektor non basis.

Analisis *Klassen Typologi* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat dilihat klasifikasi laju pertumbuhan subsektor pertanian yang diteliti sebagaimana terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Klasifikasi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah menurut *Klassen Typologi* Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Laju Pertumbuhan (r)	Kontribusi (y)	Kontribusi Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari kontribusi nasional ($y_{ik} > y_i$)	Kontribusi Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dari kontribusi nasional ($y_{ik} < y_i$)
Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari laju pertumbuhan nasional ($r_{ik} > r_i$)		Maju dan tumbuh cepat: Subsektor tanaman pangan dan peternakan	Berkembang cepat
Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dari laju pertumbuhan nasional ($r_{ik} < r_i$)		Maju tetapi tertekan	Relatif tertinggal: Subsektor tanaman perkebunan, kehutanan, perikanan

Melalui adanya pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan potensi daerah, maka terdapat perubahan subsektor pertanian yang semula relatif tertinggal menjadi berkembang. Ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah menurut *Klassen Typologi* Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Laju Pertumbuhan (r)	Kontribusi (y) Kontribusi Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari kontribusi nasional ($y_{ik} > y_i$)	Kontribusi Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dari kontribusi nasional ($y_{ik} < y_i$)
Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari laju pertumbuhan nasional ($r_{ik} > r_i$)	Maju dan tumbuh cepat	Berkembang cepat: Subsektor tanaman perkebunan dan kehutanan
Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dari laju pertumbuhan nasional ($r_{ik} < r_i$)	Maju tetapi tertekan: Subsektor tanaman pangan dan peternakan	Relatif tertinggal: Subsektor perikanan

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Dengan menggunakan analisis gabungan LQ dan DLQ, terdapat dua subsektor pertanian yang masih dapat diharapkan di masa yang akan datang (tetap basis), yaitu subsektor tanaman pangan dan peternakan saat sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini berubah setelah pelaksanaan otonomi daerah, subsektor tanaman pangan dan peternakan tetap menjadi basis, sedangkan tanaman perkebunan dan kehutanan mengalami reposisi dari non basis ke arah basis.
2. Berdasarkan hasil analisis *Klassen Typology* Provinsi Jawa Tengah, sebelum pelaksanaan otonomi daerah: subsektor tanaman pangan dan peternakan tergolong subsektor maju dan tumbuh cepat, sedangkan subsektor tanaman perkebunan, kehutanan dan perikanan tergolong pada kondisi relatif tertinggal. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, subsektor tanaman perkebunan dan kehutanan terklasifikasi pada subsektor berkembang cepat, sedangkan tanaman pangan dan peternakan berubah ke arah maju tetapi tertekan. Subsektor perikanan masih tetap merupakan subsektor relatif tertinggal.
3. Rerata laju pertumbuhan subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan mengalami peningkatan setelah penerapan otonomi daerah. Sedangkan, rerata laju pertumbuhan subsektor perikanan mengalami penurunan setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Implikasi

1. Subsektor perikanan tetap berada pada klasifikasi relatif tertinggal dengan *trend* LQ yang cenderung menurun sehingga perlu tindakan dalam meningkatkan ketrampilan para nelayan serta bantuan permodalan untuk meningkatkan peralatan penangkapan ikan. Sebagai contoh: modernisasi kapal dan alat pendeteksi sumber-sumber ikan untuk membantu para nelayan meningkatkan hasil tangkapannya.
2. Adanya reposisi basis dan perubahan struktur menjadi subsektor berkembang cepat pada subsektor tanaman perkebunan serta kehutanan maka perlu diarahkan pembangunan perkebunan dan kehutanan ramah lingkungan yang berwawasan konservasi dan berkelanjutan.
3. Subsektor tanaman pangan sangat penting dalam memelihara stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan daerah/nasional sehingga perlu membangun ketahanan pangan yang terkait dengan penyusunan kebijakan pangan (harga dan non harga), penyusunan dan penerapan standar kualitas dan keamanan pangan serta pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang bertumpu pada sumberdaya lokal.
4. Laju pertumbuhan daerah lebih kecil dibandingkan nasional pada subsektor peternakan. Oleh karena itu, perlu adanya *bio ecurity*, melakukan vaksinasi dan pembatasan impor untuk melindungi ternak dari serangan wabah penyakit serta keamanan konsumen dalam mengkonsumsi.
5. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang potensi pengembangan wilayah pertanian di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam memajukan perekonomian. Salah satunya adalah melakukan studi kelayakan terhadap pengembangan komoditas-komoditas basis pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1998. *Pendapatan Regional Jawa Tengah 1996*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2006. *Pendapatan Regional Jawa Tengah 2005*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Azwar, Khusnul, Susilo, dan Sunaryo, 1999. "Perubahan Struktur Ekonomi dan Dinamika Kependudukan di Wilayah Kabupaten Blitar". *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Social Sciences)* 10 (1).
- Istiwa, 2003. *Komoditas Unggulan dan Prospek Pengembangan di Kabupaten Kapuas Hulu*. Yogyakarta: MMA UGM.
- Soepono, P., 1993. "Analisis Shift-share: Perkembangan dan Penerapannya". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 9:43-54.

AGRO EKONOMI

- Suyatno, 2000. "Analisa Economic Base terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri: Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No.5/1999". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi*.
- Syafrizal, 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". *Prisma* 3: 27-38.